

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti merumuskan kesimpulan secara umum yaitu Pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor telah memiliki kesadaran hukum yang berada ditingkat perilaku hukum dalam memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999, jika mengacu pada indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum) hal ini menunjukkan tingkatan yang tinggi.

Secara khusus, merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor telah mengetahui adanya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Selain itu Sikap dan perilaku pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor secara umum telah memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan, hak konsumen untuk mendapatkan produk makanan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi produk makanan, hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas produk makanan yang dikonsumsi, Hak konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
2. Kepatuhan hukum pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor dalam memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 bersifat *heteronomous*, yakni dalam pemenuhan hak-hak konsumen tersebut didasari oleh berbagai macam alasan, di antaranya didasari oleh rasa takut akan sanksi pencabutan izin edar produk (*authority-oriented*), didasari oleh kiproh umum atau mengikuti perilaku pelaku usaha

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

produk makanan industri rumah tangga lainnya (*sosionomous*), dan didasari oleh karena tahu aturannya (*autonomous*).

3. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam memenuhi hak konsumen, diantaranya dengan diadakan pelatihan rutin yang merupakan salah satu wadah sosialisasi Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan pelatihan rutin ini diharapkan pelaku usaha menjadi para pelaku usaha industri rumah tangga produk makanan yang terlatih dan berkualitas. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Bogor bekerja sama dengan BPOM pusat menyelenggarakan pengawasan perusahaan dan produk, diharapkan dengan sidak ini, dapat memberikan efek jera bagi oknum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, dan memberi rasa takut kepada pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor lainnya ketika akan melanggar hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan untuk beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Bagi pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga di Kota Bogor perlu:
 - a. Mengikuti penyuluhan hingga pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan maupun instansi lainnya tanpa diwakilkan, dan perlu memperluas informasi melalui media cetak maupun elektronik mengenai hak-hak konsumen, agar mendapatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Memenuhi seluruh hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 yaitu hak konsumen untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapat informasi, hak untuk mendapat perlakuan yang baik, hak untuk didengarkan keluhannya, hak

Amanda Putri Sukamto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

untuk mendapat harga yang sesuai dengan kualitas, dan hak untuk mendapatkan kompensasi.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Bogor perlu:

- a. Mengefektifkan pelatihan-pelatihan yang telah diprogramkan dengan mengintensifkan pelatihan, dan mengikutsertakan seluruh pelaku usaha PIRT di Kota Bogor serta memprogramkan pelatihan yang dikhususkan untuk membahas peraturan dan perundang-undangan, salah satunya Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Lebih rutin memberikan pengawasan kepada industri rumah tangga produk makanan, agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk makanan industri rumah tangga.

3. Bagi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Bagi Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan

Mahasiswa merupakan *agent of change*, maka diperlukan kontribusi melalui kegiatan HMCH dalam memberikan penyuluhan maupun sosialisasi tentang pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat luas.

- b. Bagi Mata Kuliah

Dalam mata kuliah Pendidikan Hukum, Sosiologi Hukum, dan Filsafat Hukum, perlu sinkronisasi antara teori dengan praktek, dengan cara mahasiswa terjun langsung ke masyarakat untuk mengkaji tentang sikap dan perilaku hukum, terutama tentang kepatuhan warga negara terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Mengingat keterbatasan dalam penulisan karya ilmiah ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya, dapat meneliti kesadaran hukum pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen di Kota Bogor, bukan hanya dalam skala perusahaan industri rumah tangga, namun dalam skala objek penelitian yang lebih besar serta lebih luas. Dan menggunakan metode penelitian yang lebih komprehensif, bukan hanya secara kuantitatif dengan pengukuran skala sikap, tetapi juga menggunakan

teknik pengumpulan data tes pengetahuan serta pemahaman hukum yang diberikan kepada para pelaku usaha.



Amanda Putri Sukanto, 2013

Hubungan Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produk Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Memenuhi Hak Konsumen Di Kota Bogor (Studi deskriptif tentang kepatuhan hukum terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1999)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu